

# **PERLUNYA PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA**

**Buchory MS**

## **Bagian Pertama dari Dua Tulisan**

Tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun politik karena berbagai peristiwa politik memang banyak terjadi pada tahun ini. Pada tanggal 9 April yang akan datang, bangsa kita akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Kabupaten/Kota. Sementara itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat juga akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Kedua kegiatan pemilu tersebut sudah barang tentu diawali dengan serangkaian kegiatan administratif termasuk kampanye (pra pemilu) seperti sekarang ini dan kegiatan yang menyertainya (pasca pemilu), seperti penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pelantikan anggota lembaga legislatif, serta penetapan dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

### **Partisipasi Pemilu**

Menyimak dua kali kegiatan pemilu sejak bangsa ini memasuki era reformasi, yaitu pemilu pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu, ternyata angka partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya mempunyai kecenderungan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah warganegara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih dikenal dengan golongan putih (golput) mengalami peningkatan. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi warganegara pada pemilu, baik untuk memilih anggota lembaga perwakilan

rakyat maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di negeri ini tentunya cukup memprihatinkan kita semua. Betapa kita tidak prihatin, karena menurut data yang ada jumlah warganegara yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu anggota lembaga legislatif tahun 2009 yang lalu hanya mencapai angka 70,96 % sehingga angka golput sebesar 29,04 %. Hal ini dapat dimaknai bahwa para anggota legislatif di Indonesia masa bakti 2009-2014 ini hanya dipilih dan didukung oleh sekitar dua pertiga dari jumlah warganegara kita yang mempunyai hak pilih, karena hampir sepertiga jumlah pemilih tidak menggunakan haknya atau memilih golput.

Jika dibandingkan dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif pada masa reformasi lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004 ternyata tingkat partisipasi warganegara pada pemilu anggota legislatif mencapai angka 84,07 % dan angka golput sebesar 15,93 %. Dengan demikian tingkat partisipasi warganegara pada pemilu anggota legislatif pada tahun 2009, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,11 % dan sebaliknya angka golput juga mengalami kenaikan yang sama, yaitu sebesar 13,11 %. Bahkan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif pada waktu sebelumnya, tingkat partisipasi warganegara pada pemilu 2009 yang lalu adalah yang paling rendah sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sementara itu tingkat partisipasi warganegara pada pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, ternyata kondisinya juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Artinya bahwa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 juga terjadi penurunan tingkat partisipasi

warganegara yang menggunakan hak pilihnya dan sebaliknya ada peningkatan angka golput. Hal ini dapat dilihat dari hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juli 2009, bahwa tingkat partisipasi warganegara menggunakan hak pilihnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 72,56 % dan berarti jumlah angka golput sebesar 27,44 %. Tingkat partisipasi warganegara ini ternyata juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Pada putaran pertama pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung tahun 2004, tingkat partisipasi warganegara kita mencapai angka 78,23 %, sedangkan jumlah golput mencapai angka sebesar 21,77 %. Sementara itu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, tingkat partisipasi warganegara mencapai angka sebesar 76,63 % dan sebaliknya angka golput mencapai 23,34 %.

Berdasarkan angka partisipasi warganegara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden di atas, ternyata pada pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden tahun 2009, tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan dibandingkan pemilu yang sama tahun 2004. Walaupun pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 hanya dilaksanakan satu putaran tetapi tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan sebesar 5,67 % dan angka golput meningkat sebesar 5,67 % pada putaran pertama. Sedangkan dibandingkan dengan putaran kedua, tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan sebesar 4,07 % yang berarti angka golput meningkat sebesar 4,07 %.

### **Perlunya Pendidikan Politik**

Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat partisipasi warganegara kita dalam menggunakan hak pilihnya, baik pada pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif tanggal 9 April 2014 dan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang, perlu kiranya ditingkatkan efektivitas pendidikan politik bagi warganegara di Indonesia.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd. adalah Guru Besar PPKN dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).**

# **PERLUNYA PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA**

**Buchory MS**

## **Bagian Kedua dari Dua Tulisan**

Pendidikan politik merupakan proses pendidikan yang menunjukkan cara bagaimana generasi muda anak bangsa diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan bidang politik yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa. Pendidikan politik itu memiliki berbagai karakteristik, seperti : (1) suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkembangkan pandangannya tentang politik; (2) merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik; (3) kadar atau bobot partisipasi dan perilaku politik seseorang ditentukan oleh seberapa besar intensitas pendidikan politiknya, karena antara pendidikan politik dengan partisipasi dan perilaku politik keduanya saling terkait. Artinya makin luas pengetahuan seseorang berkaitan dengan politik, maka makin tinggi tingkat partisipasinya dalam kegiatan politik, seperti pemilu. Demikian juga sebaliknya makin rendah tingkat pengetahuan seseorang terkait dengan politik, maka tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan politik juga akan rendah.

Kecenderungan adanya penurunan angka partisipasi pemilu dan peningkatan angka golput, diprediksi juga akan terjadi pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 ini. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April yang akan datang, tidak ada jaminan bahwa angka partisipasi pemilu akan meningkat. Apabila hal ini terjadi, maka patut disayangkan karena pemilu tahun ini dinilai sebagai pemilu yang menentukan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Betapa tidak, karena pemilu 2004 dan 2009 yang lalu

ternyata melahirkan banyak wakil rakyat yang kurang membela kepentingan rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Pemilu tahun ini harus dapat dijadikan wahana koreksi total dan pertarungan apakah kita akan terus melahirkan wakil rakyat yang banyak melakukan korupsi dengan melakukan golput, atau kita menggunakan hak pilih sehingga dapat melahirkan wakil rakyat yang memiliki integritas, jujur, anti korupsi, dan membela kepentingan rakyat.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan partisipasi warganegara di bidang politik, ada beberapa jenis lembaga pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara. Adapun berbagai lembaga-lembaga tersebut adalah : (1) keluarga, (2) lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan (*peer group*), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

**Pendidikan Politik melalui Keluarga.** Sebagaimana diketahui bersama bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk watak dan kepribadian serta perilaku politik anaknya. Orang tua berperan mengajarkan kepada anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, dan negaranya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

**Pendidikan Politik melalui Lembaga Pendidikan.** Lembaga pendidikan yang dikenal dengan lingkungan pendidikan formal merupakan lingkungan ke dua setelah keluarga, juga memiliki peranan yang besar dalam membina dan mengembangkan kepribadian seseorang. Ada beberapa aspek lingkungan sekolah yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan partisipasi politik

warganegara, yaitu (a) jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan oleh anak, (b) kurikulum sekolah, dan (c) aspek lingkungan sekolah. Melalui lembaga pendidikan formal ini, siswa dapat berorganisasi dengan aktif dalam kepengurusan OSIS, berinteraksi dengan buku-buku di perpustakaan, termasuk kegiatan siswa di bidang ko-kurikuler.

Di samping lembaga pendidikan formal juga ada beberapa lembaga pendidikan non formal, seperti **teman sebaya/sepergaulan (*peer group*)**. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah insan politik (*zoon politicon*) sehingga senantiasa merasa saling ketergantungan, keterkaitan, dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu kelompok sosial yang menjadi ajang seseorang untuk hidup dengan orang lain adalah teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/ seprofesi (*peer group*). Unit sosial ini mempunyai peranan sebagai media pendidikan politik bagi warganegara.

**Media Massa** juga merupakan lembaga pendidikan politik yang sangat efektif. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kita senantiasa melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. Surat kabar, majalah, radio, film, telepon, dan televisi merupakan media yang memungkinkan sumber informasi politik dapat menjangkau audien dalam jumlah besar dan tersebar luas. Satu lagi lembaga pendidikan politik yang bersifat non formal yaitu organisasi politik atau partai politik. **Organisasi politik** atau partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warganegara secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu, Salah satu fungsi

organisasi politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan warganegara pada umumnya. Dengan demikian peranan organisasi politik ini bersifat langsung dalam upaya melakukan pendidikan politik bagi warganegara.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu era reformasi ini, perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Berbagai upaya perlu dilakukan dan semua lembaga pendidikan politik perlu dilibatkan dan ditingkatkan efektivitasnya. Dengan cara demikian, maka angka golput dapat diminimalisir dan angka partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya dapat dimaksimalkan. Semoga pemilu tahun 2014 yang sudah diambang pintu ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan semua warganegara kita berpartisipasi aktif mensukseskannya. Amin.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd. adalah Guru Besar PPKN dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).**